



PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA INDIVIDU DALAM HUKUM PIDANA INTERNASIONAL

Danel Aditia Situngkir¹

ABSTRACT

The debate about the whereabouts of individuals as the subject of international law over time seems to get an answer. This is because after the first and second world wars, the international community's attention to human rights is increasing. The desire to bring the responsible perpetrators to account before the criminal court. Efforts to eliminate immunity against perpetrators for crimes committed encourage the establishment of international criminal tribunals ranging from the ad hoc nature to the permanent criminal court. Encouraging individuals as the rights and obligations in international criminal law is getting stronger. Be interesting because the individuals who are held accountable are citizens who actually have the sovereignty to enforce the law to their citizens. This paper will discuss the existence of individuals as subjects of international law and the effort to hold individuals accountable through international court mechanisms. The research method used is normative juridical. Based on legal theory, legal principles, sources of international law and international treaties. From the discussion it is concluded that the existence of individuals in international law can be seen from the granting of rights and obligations in international treaties. The Adhoc and Permanent International Criminal Court is established to demand the accountability of serious crimes against humanity.

Keywords : Criminal Responsibility, Individual, International Criminal Law

¹ Sekolah Tinggi Bahasa Asing Prayoga

A. Pendahuluan

Dalam hukum internasional istilah yang sering dipakai untuk pertanggungjawaban adalah *responsibility* atau *liability*. Terlepas dari perdebatan pemberian makna antara *responsibility* dan *liability*, secara konsep pertanggungjawaban terjadi ketika adanya pelanggaran terhadap norma dan prinsip yang mengikat dalam hukum, baik nasional maupun internasional. Dalam konsep hukum internasional secara umum, pertanggungjawaban yang dipadankan dengan *responsibility* dianggap sebagai salah satu prinsip dasar dalam hukum internasional, dimana norma pertanggungjawaban difokuskan pada sebab-sebab terjadinya suatu perbuatan, akibat dari perbuatan tidak sah secara hukum, dan khususnya pemberian kompensasi untuk itu(Ian Browlie, 1979).

Dalam hukum internasional, menurut pandangan kamum positivis bahwa yang menjadi subjek hukum internasional hanya negara. Namun melihat relitas dalam hubungan internasional bahwa individu sebagai natural person diatur hak dan kewajibannya atau diberikan tanggung jawab sebagai pemangku hak dan

kewajiban dalam hukum internasional. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa yang lebih populer dalam hukum internasional adalah istilah tanggung jawab negara dari pada tanggung jawab individu.

Tanggung jawab negara (*state responsibility*) merupakan prinsip fundamental dalam hukum internasional yang bersumber dari doktrin para ahli hukum internasional. Tanggung jawab negara timbul bila terdapat pelanggaran atas suatu kewajiban internasional untuk berbuat sesuatu, baik kewajiban tersebut berdasarkan perjanjian internasional maupun berdasarkan pada kebiasaan internasional.(Sujatmoko, 2005)

State responsibility muncul sebagai akibat dari adanya prinsip persamaan dan kedaulatan negara (*equality and sovereignty of state*) yang terdapat dalam hukum internasional.Prinsip ini kemudian memberikan kewenangan bagi suatu negara yang terlanggar haknya untuk menuntut suatu hak yaitu berupa perbaikan (*reparation*).Meskipun suatu negara mempunyai kedaulatan atas dirinya, tidak lantas negara tersebut dapat menggunakan kedaulatannya tanpa menghormati kedaulatan negara-negara

lain. Didalam hukum internasional telah diatur bahwa kedaulatan tersebut berkaitan dengan kewajiban untuk tidak menyalahgunakan kedaulatan itu sendiri, karena apabila suatu Negara

Munculnya individu sebagai pemangku hak dan kewajiban pada tataran internasional tidak bisa dipisahkan dari semakin diperhatikannya perlindungan hak asasi manusia. Aturan-aturan yang termuat dalam Konvensi-konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan I hingga Protokol Tambahan III, Konvensi ENMOD, serta Statuta Roma bukan hanya mengikat negara sebagai pihak yang menandatangani, tetapi juga mengikat tindakan yang dilakukan oleh individu, baik mengatasnamakan negara atau kelompok tertentu yang terpisah dari negara. Bab sebelumnya, penulis telah mendeskripsikan kewajiban individu melalui norma-norma tertulis maupun prinsip-prinsip tidak tertulis yang mendasari sebuah norma.

Pertanggungjawaban pidana sebenarnya bukanlah masalah baru dalam hukum internasional. Pada awal abad ke 14 Raja Richard II dari Inggris membuat peraturan yang ditujukan untuk

menetapkan batas-batas perilaku permusuhan dan tindakan yang dilarang terhadap wanita dan pendeta (pemuka agam) yang tidak bersenjata, pembakaran rumah dan pengrusakan gereja. Pelaku yang melanggar dapat dijatuhi hukuman mati. Pada saat itu, muncul manifestasi awal dari berbagai kelas kejahatan seperti kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, tetapi tidak ada kerangka pengaturan yang jelas. Selain itu, tanggung jawab negara hanya sekedar "diucapkan" daripada tanggung jawab individu, sehingga tidak ada tindakan hukuman untuk menghukum orang-orang yang telah melakukan tindakan seperti itu dalam kapasitas sebagai perwakilan dari pemangku jabatan dalam negara. (Chris Wigwe Esq, 2015)

Perjanjian pertama yang mengatur tanggung jawab pidana individu di tingkat internasional adalah Perjanjian Versailles 1919, yang isinya: "... *the right of the Allied and Associated Powers to bring before military tribunals persons accused of having committed acts in violation of the laws and customs of war.* (Versailles, 1919)

Semakin menguatnya kedudukan inividu dalam kapasitas sebagai subjek

hukum internasional juga dapat dilihat dari *case concerning competence of the court of Danzig*, dimana Danzig dan Polandia membuat satu perjanjian internasional yang mengatur persyaratan pekerjaan bagi pejabat yang bekerja bagi perkertaapian Polandia. Para pejabat tersebut mempunyai hak untuk menuntut penggantian klaim terhadap administrasi perkeretaapian Polandia. Dalam kasus ini Advisory opinion dari Permanent Court of International of Justice tahun 1928 berpendapat pada dasarnya perjanjian tidak akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi individu kecuali para pihak yang terlibat menghendaki demikian.(Sefriani, 2009)

Selanjutnya pada Perang Dunia II yang berlangsung dari tahun 1939-1945 dan perang asia timur raya (bagian dari Perang Dunia II) yang berlangsung dari tahun 1942-1945 telah menimbulkan korban luar biasa banyak, baik berupa korban manusia, harta benda, baik di pihak pemenang perang maupun pihak yang kalah perang. Setelah perang berakhir muncul ide untuk meminta pertanggungjawaban secara langsung kepada individu yang dituduh melakukan pelanggaran hukum internasional dengan

mengajukannya kehadapan pengadilan internasional.(Parthiana, 2006)

Kewajiban dasar dari perjanjian yang ditemukan dalam hukum kebiasaan internasional adalah mengikatnya perjanjian tersebut bagi para pihak.(Shaw, 2003) Asas *pacta sunt servanda* merupakan salah satu norma dasar dalam hukum perjanjian, dan erat kaitannya dengan asas itikad baik untuk menghormati atau mentaati ketentuan dalam perjanjian

Nuremberg Tribunal dan Tokyo Tribunal merupakan upaya yang dilakukan untuk menyeret para pelaku pelanggaran hukum internasional ke pengadilan. Selain pengadilan pidana internasional, Perang Dunia II juga memunculkan upaya kodifikasi terhadap hukum perang yang selama ini hanya diatur dalam hukum kebiasaan internasional. Konferensi Diplomatik dalam rangka pembentukan Konvensi Internasional untuk Perlindungan Korban Perang diadakan di Jenewa pada tanggal 21 April hingga 12 Agustus 1949. Konferensi ini menghasilkan 4 (empat) Konvensi, yaitu : (International Committee of the Red Cross, 1949)

1. *Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field*
2. *Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea*
3. *Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War*
4. *Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War*

Dalam perkembangan selanjutnya kembali dibentuk pengadilan pidana internasional *ad hoc* di negara bekas Yugoslavia dengan nama *International Criminal Tribunal for The Former Yugoslavia/ ICTY* (Mahkamah Kejahatan Perang untuk Kasus bekas Yugoslavia) pada tahun 1993, dan di negara Rwanda dengan nama *International Criminal Tribunal For Rwanda/ ICTR* (Mahkamah Kejahatan Perang untuk Kasus bekas Rwanda) pada tahun 1994.

Keempat Pengadilan Pidana Internasional ini dibentuk setelah terjadinya suatu peristiwa yang dianggap pelanggaran serius terhadap kemanusiaan. Dorongan untuk membentuk badan

pengadilan yang sifatnya permanen terus bergulir sampai Akhirnya tanggal 17 Juli 1998 diadopsi Statuta Mahkamah Pidana Internasional pada Konferensi PBB Berkuasa Penuh di Roma. Sebagaimana pandangan kaum postivisme bahwa hukum internasional dapat menjadi hukum positif apabila ada persetujuan dari Negara-negara untuk tunduk pada hukum internasional, sesuai dengan pasal 126, Statuta Roma baru dinyatakan berlaku pada 1 Juli 2002 setelah 60 negara mendaftarkan ratifikasinya terhadap ketentuan Statuta Roma.

Pembentukan berbagai pengadilan pidana internasional baik adhoc maupun yang sifatnya permanen menunjukkan keseriusan dari masyarakat internasional untuk meminta pertanggungjawaban individu atas perbuatan yang telah dilakukannya yang dianggap merupakan pelanggaran serius terhadap kemanusiaan.

B. Metode Penelitian

Kajian penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan melihat hukum internasional sebagai kaidah/norma dan prinsip-prinsip hukum umum dalam penegakan hukum pidana internasional. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*),

dimana beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum(Peter Mahmud Marzuki, 2005) penelitian ini didasarkan pada sejarah dan ketentuan dalam hukum perjanjian internasional dan hukum pidana internasional. metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi dokumen. Data yang diproleh dengan studi dokumen tersebut kemudian digunakan penafsiran. Penafsiran yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah penafsiran sejarah yaitu dengan menelaah sejarah hukum atau menelaah pembuatan suatu ketentuan yang diatur dalam perjanjian internasional khususnya yang berkaitan dengan pidana internasional

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Individu Sebagai Subjek Hukum Internasional

Sebagaimana telah menjadi pengetahuan umum di kalangan sarjana hukum, sampai dengan perkembangannya saat ini, yang telah diterima sebagai subjek hukum internasional yaitu pemegang hak dan kewajiban dalam hukum internasional. Selain negara adalah Tahta Suci (Vatican), Palang Merah Internasional, organisasi internasional, orang perorangan

(individu), dan pihak dalam sengketa (*belligerent*).

Kompetensi individu sebagai pemangku hak dan kewajiban lebih dulu diakui didalam hukum nasional berbagai negara. Dimana hak asasi manusia dilindungi oleh seperangkat aturan yang dibuat oleh negara. Bahkan lebih jauh tentang hak asasi manusia secara konsepsi adalah pembatasan kewenangan dari penguasa agar tidak bertindak semena-mena terhadap warga negaranya. Dalam perkembangannya hak-hak individu itu memperoleh tempatnya pada: (Kusniati & Retno, 2011)

1. Magna Carta (1215) yang berisi kompromi pembagian kekuasaan Raja John dengan bangsawannya dan memuat gagasan HAM yang menjamin adanya perlindungan rakyat dari penangkapan, penahanan dan pembuangan kecuali ada keputusan pengadilan yang sah.
2. Habeas Corpus (1679) di Inggris yang mengharuskan seseorang yang ditangkap diperiksa dalam waktu singkat.
3. Glorius Revolution di Inggris pada tahun 1688 disusul Bill of Rights (1689) yang memuat hak-hak

- rakyat dan menegaskan kekuasaan Raja tunduk di bawah Parlemen.
4. Declaration of Independence 1788 yang disusun Thomas Jefferson mencantumkan bahwa manusia karena kodratnya bebas merdeka serta memiliki hak-hak yang tidak dapat dipisahkan atau dirampas dengan sifat kemanusiaannya berupa; hak hidup, hak memiliki, hak mengejar kebahagiaan dan keamanan
 5. Pandangan inilah yang dibawah Marquis de lafayette ke Perancis dan dimuat di *Des Droit De L'Homme et Du Citoyen* (Deklarasi Hak Manusia dan Warga Negara 1789) Pasal 1 : “Tujuan setiap organisasi politik adalah pelestarian HAM yang kodrati dan tidak dapat dicabut. Hak-hak itu adalah kebebasan (*Liberty*), Harta (*Property*), keamanan (*Safety*), perlawanannya terhadap penindasan (*Resistance of Oppression*)
- Bahkan demi perlindungan hak terhadap individu, dalam hukum pidana nasional terdapat beberapa hal yang menyebabkan orang tidak boleh dijatuhi hukuman. Dalam ranah pidana terdapat beberapa teori yang menjadi alasan penghapusan pidana. Dengan kata lain meskipun seseorang telah memenuhi rumusan undang-undang bahwa perbuatan tersebut dapat dihukum, akan tetapi pelaku tersebut tidak dihukum. Teori tersebut yaitu:(Hamdan, 2012)
1. *The Theory of lesser evils*

Dalam teori ini suatu perbuatan dapat dibenarkan dilandasai beberapa argumen : dilakukan dalam rangka menyelamatkan kepentingan yang lebih besar, jika perbuatan tersebut adalah cara yang mudah untuk menghindari ancaman.
 2. *The Theory of Pointless Punishment*

Dalam teori ini digolongkan ke dalam alasan pemaaf. Perbuatan seseorang yang terjadi diluar kesadarannya, misalnya pelaku sakit jiwa tidak ada manfaatnya sama sekali untuk dihukum. Jadi tidak ada perlunya menghukum seseorang yang melakukan sesuatu tanpa disadarinya.
 3. *The Theory of necessary defence*

Dalam teori ini dijelaskan bahwa suatu perbuatan pembelaan diri yang dilakukan dengan cara yang tepat dan benar sehingga tidak ada pilihan lain

yang berakibat dilanggarnya norma hukum tidak dapat dipidana.

Konsep universalitas dari perlindungan hak asasi manusia ini didorong oleh pemahaman yang sama negara-negara bahwa hak asasi manusia tersebut adalah hak kodrati manusia yang berasal dari Tuhan yang wajib dilindungi oleh negara. Dalam perkembangannya masalah konflik atau perang menjadi isu kontemporer, jumlah korban jiwa merupakan konsekuensi logis akibat konflik atau perang. Korban jiwa ini tidak hanya meliputi korban dari pihak militer, namun juga korban sipil.

Perang Dunia kedua yang berlangsung dari tahun 1939-1945 dan perang asia timur raya (bagian dari Perang Dunia II) yang berlangsung dari tahun 1942-1945 telah menimbulkan korban luar biasa banyak, baik berupa korban manusia, harta benda, baik di pihak pemenang perang maupun pihak yang kalah perang. Setelah perang berakhir muncul ide untuk meminta pertanggungjawaban secara langsung kepada individu yang dituduh melakukan pelanggaran hukum internasional dengan mengajukannya kehadapan pengadilan internasional.

Bahkan dari segi substansi beberapa perjanjian internasional secara tegas memberikan hak dan kewajiban kepada individu dalam hukum internasional. Misalnya saja Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 tentang Pelanggaran hukum atau kebiasaan perang, genosida, Kejahatan terhadap kemanusiaan dan Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida tahun 1948. Dua perjanjian ini menekankan pentingnya menghukum para pelaku kejadian-kejadian yang dianggap paling serius terhadap kemanusian.

Upaya menghukum para pelaku tersebut dianggap upaya yang paling nyata, sebab tidak mungkin meminta pertanggungjawaban pidana kepada negara dimana pelaku-pelaku kejadian tersebut bernaung. Dalam hukum internasional, setiap negara memiliki hak untuk menjalankan yurisdiksi kriminal atas tindakan dalam teritorial Negaranya. Pelaksanaan yurisdiksi pidana merupakan sebagai aspek sentral kedaulatan itu sendiri.(Shaw, 2003)

Hal lain yang membuktikan eksistensi individu sebagai subjek hukum internasional adalah adanya kekebalan/*immunity*. Bagi Kepala Negara terdapat

dua jenis kekebalan Kepala Negara. Pertama, yang disebut imunitas atau kekebalan fungsional untuk tindakan resmi (*ratione materiae*), yang diberikan kepada seluruh pejabat negara untuk tujuan tidak menghambat, atau mengganggu, kinerja kegiatan kenegaraannya. Konsekuensinya adalah bahwa seorang pejabat publik tidak dapat bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan kapasitas resmi, karena ini harus dirujuk ke negara itu sendiri. Sebuah penerapan prinsip ini kepada perwakilan diplomatik yang diatur dalam pasal 39 ayat (2) Konvensi Wina 1961. Kedua, kekebalan pribadi Kepala Negara (*ratione personae*), berdasarkan hal tersebut kekebalan Kepala Negara sebanding dengan yang diberikan kepada perwakilan diplomatik atas tindakan pribadi, menunjukkan kekebalan baik dari yurisdiksi perdata dan pidana sebagai bentuk perlindungan tambahan.(Zappalà, 2001)

Dari paparan diatas maka selayaknya keberadaan individu dalam hukum internasional tidak perlu diperdebatkan lagi. Jika dikaitkan dengan statusnya sebagai warga negara, keberadaan individu tersebut selalu

dikaitkan dengan persetujuan dari negara.Namun dalam perkembangannya, individu dalam batas-batas tertentu dapat bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri dalam wilayah hukum internasional. Oleh karena itu individu dapat dibebani kewajiban-kewajiban internasional dan dapat dimintai pertanggungjawab atas perbuatannya yang bertentangan dengan hukum internasional.(Jawahir Thontowi, 2006)

2. Upaya Menuntut Pertanggungjawaban Pidana Individu Melalui Mekanisme Pengadilan Internasional

Menguatnya dorongan untuk meminta pertanggungjawaban individu melalui mekanisme pengadilan pidana internasional telah dimulai melalui 4 (empat) pengadilan adhoc yang telah ada sebelumnya, yaitu:

1. *Nuremberg Tribunal* (Makhamah Militer Internasional Nuremberg)
Keinginan negara sekutu untuk menghukum para penjahat perang besar dari *European Axis* pertama kali dikemukakan dalam Konferensi Moskow tahun 1943. Kemudian Amerika Serikat, Prancis, Inggris dan Republik Uni Soviet

menandatangani *London Agreement* pada tanggal 8 Agustus 1945 untuk mendirikan Mahkamah Militer Internasional.(United Nations General Assembly, 1949) Mahkamah ini dibentuk untuk mengadili penjahat/ orang-orang yang bertindak dalam kepentingan *European Axis Countries*, baik sebagai individu atau sebagai anggota organisasi, yang melakukan kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan. (United Nations General Assembly, 1949) Dalam Piagam Nuremberg disebutkan Mahkamah memiliki kewenangan untuk mengadili individu yang bertindak sebagai pemimpin, pelaksana, penghasut dan pembantu, berpartisipasi dalam perumusan atau pelaksanaan rencana atau konspirasi untuk melakukan salah satu kejahatan yang menjadi yurisdiksi kriminal Mahkamah. Piagam Nuremberg juga menyebutkan bahwa kedudukan pelaku, baik sebagai Kepala Negara atau pejabat yang bertanggung jawab dalam

pemerintahan, tidak dianggap sebagai alasan pembedar untuk membebaskan mereka dari tanggung jawab atau meminimalkan hukuman.(United Nations General Assembly, 1949) Selain itu, fakta bahwa pelaku bertindak sesuai dengan perintah negara atau dari atasan, tidak akan membebaskannya dari tanggung jawab, tetapi dapat dipertimbangkan dalam pengurangan hukuman. Mahkamah dapat menyatakan bahwa kelompok atau organisasi adalah sebuah organisasi kriminal.Dalam hal terdakwa tidak dapat ditemukan, Mahkamah diberi wewenang untuk mengambil keputusan secara *in absentia*. (United Nations General Assembly, 1949)

Pengadilan Nurenberg ini awalnya memeriksa 22 terdakwa, namun akhirnya secara keseluruhan terdakwa yang diadili sebanyak 99 orang.(Eddy OS Hiariej, 2010)

2. *Tokyo Tribunal* (Mahkamah Militer Internasional Tokyo)
Jenderal MacArthur bertindak dengan kewenangan sebagai panglima tertinggi sekutu pada

tanggal 19 Januari 1946 mendirikan Mahkamah untuk mengadili orang-orang secara individu atau sebagai anggota organisasi atau keduanya yang melakukan kejahatan terhadap perdamaian. (International, 1949) Mahkamah Internasional untuk Timur Jauh ini dibentuk untuk menghukum dengan menyelenggarakan persidangan yang adil dan cepat para penjahat perang besar di timur jauh. (International, 1949) Mahkamah Internasional ini memiliki yuridiksi mengadili dan menghukum penjahat perang Timur Jauh sebagai individu atau sebagai anggota organisasi yang didakwa dengan pelanggaran yang meliputi Kejahatan terhadap Perdamaian Konvensional Kejahatan Perang Kejahatan Terhadap Kemanusiaan. (International, 1949) Dalam Piagam Tokyo, mahkamah memiliki kewenangan untuk mengadili individu, baik dalam posisi resmi, atau bertindak sesuai dengan perintah negara atau atasan akan dengan sendirinya dapat dipertimbangkan dalam

pengurangan hukuman. (International, 1949) Pengadilan Tokyo ini mengadili total terdakwa 5.700 orang (Eddy OS Hiariej, 2010) Kedua pengadilan pidana internasional (Nuremberg Tribunal dan Tokyo Tribunal) ini dibuat ketika suatu peristiwa yang dianggap pelanggaran serius terhadap kemanusiaan telah terjadi. Artinya pelaku-pelaku dianggap dihukum berdasarkan statuta atau perjanjian yang dibuat kemudian. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip non retroaktif (tidak boleh berlaku surut) dan asas pacta sunt servanda. Karena pengadilan tersebut dibentuk berdasarkan statuta/ perjanjian yang tidak dapat persetujuan dari negara yang warga negara yang diadili.

3. *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia/ ICTY* (Mahkamah Kejahatan Perang dalam Kasus bekas Yugoslavia) Mahkamah ini didirikan berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB yang bertindak berdasarkan Bab VII Piagam PBB,

Mahkamah dibentuk untuk menuntut orang bertanggung jawab terhadap pelanggaran berat hukum humaniter internasional di wilayah bekas Yugoslavia sejak tahun 1991 . Mahkamah memiliki yurisdiksi untuk mengadili orang-orang yang bertanggung jawab atas pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional (pelanggaran berat Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949, Pelanggaran hukum atau kebiasaan perang, genosida, Kejahatan terhadap kemanusiaan).

Sejak dibentuk pengadilan ini sampai hari ini masih terus bekerja untuk memeriksa, menuntut dan mengadili orang-orang yang patut dimintai pertanggungjawabannya dihadapan pengadilan. Proses pengadilannya tergolong memakan waktu yang lama. Putusan pengadilan yang terbaru adalah atas terdakwa Jadranko Prlić (25 tahun), Bruno Stojić (20 tahun),Milivoj Petković (20 tahun), Berislav Pušić (10 tahun) Valentin Ćorić (16 tahun), Slobodan Praljak (20 tahun).(ICTY, 2007)

4. *International Criminal Tribunal for Rwanda/ ICTR* (Mahkamah Kejahatan Perang dalam Kasus bekas Rwanda)
Mahkamah ini didirikan berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB yang bertindak berdasarkan Bab VII Piagam PBB untuk menuntut Orang Bertanggung jawab terhadap kejahatan genosida dan pelanggaran serius hukum humaniter internasional lain di Wilayah Rwanda dan Negara tetangga, yang terjadi antara 1 Januari 1994 sampai 31 Desember 1994 Mahkamah Internasional memiliki yurisdiksi mengadili orang-orang yang bertanggung jawab atas pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional (genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, Pelanggaran Pasal Umum 3 Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan II)
Dalam Statuta ICTY dan ICTR, Mahkamah memiliki yurisdiksi terhadap individu, yang : (ICTY, 2007)
 - a. Merencanakan, menghasut, memerintahkan, melakukan

- atau membantu dan bersekongkol dalam perencanaan, persiapan atau pelaksanaan suatu kejahatan.
- b. Jabatan resmi dari orang yang dituduh, baik sebagai Kepala Negara atau Pemerintah atau sebagai pejabat pemerintah yang bertanggung jawab, tidak akan membebaskan orang tersebut dari tanggung jawab.
- c. Seorang bawahan tidak membebaskan atasannya dari tanggung jawab pidana, jika atasannya mengetahui atau memiliki alasan untuk mengetahui bahwa bawahan melakukan kejahatan atau telah melakukannya dan atasannya gagal untuk mengambil tindakan yang wajar serta diperlukan untuk mencegah tindakan tersebut atau menghukum pelakunya.
- d. Orang yang bertindak sesuai dengan perintah dari Negara ataupun atasannya tidak akan bebas dari tanggung jawab pidana, tetapi dapat dipertimbangkan dalam pengurangan hukuman.
5. Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*)
- Mahkamah Pidana Internasional didirikan berdasarkan statuta romawi yang memiliki yurisdiksi mengadili kejahatan : genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi.
- Dalam pasal 25 (1) Statuta Roma jelas disebutkan : “*the court shall have jurisdiction over natural persons pursuant to this Statute*“.
- Individu yang dapat dimintai pertanggung jawabannya adalah :
- Melakukan kejahatan tersebut, baik sebagai individu, bersama-sama dengan orang lain atau melalui orang lain, terlepas dari apakah orang lain itu bertanggung jawab secara criminal.
 - Memerintahkan, memudahkan atau membujuk supaya tindakan kejahatan tersebut yang sebenarnya terjadi atau dicoba.
 - Untuk tujuan memfasilitasi kejahatan seperti itu,

- membantu, bersekongkol atau mendukung tindakan atau usaha coba melakukan, termasuk menyediakan sarana untuk melakukannya.
- d. Dengan cara lain memberikan kontribusi kepada komisi atau coba kejahatan tersebut oleh sekelompok orang yang bertindak dengan tujuan yang sama. Kontribusi semacam itu haruslah merupakan kesengajaan dan keharusan.
- e. Dilakukan dengan tujuan untuk memperluas kegiatan kejahatan atau tujuan kejahatan kelompok, di mana kegiatan atau tujuan melibatkan kejahatan di dalam juridiksi Pengadilan; atau
- f. Dilakukan dengan sepenuhnya atas kesengajaan dari kelompok untuk melakukan kejahatan.
- Mahkamah Pidana Internasional memiliki yurisdiksi terhadap orang-orang atau individu-individu yang harus bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukannya (*individual criminal responsibility*).
- Prinsip-prinsip umum terkait dengan beberapa karakter khusus orang yang dapat dimintai pertanggungjawabnya dalam Statuta Roma adalah :
- a. Statuta ini akan berlaku kepada setiap orang tanpa melihat perbedaan berdasarkan jabatannya dalam pemerintahan.
 - b. Seorang komandan militer bertanggung jawab secara pidana untuk kejahatan yang dilakukan oleh pasukan dibawah kewenang/komando nya, atau akibat dari kegagalannya dalam mengendalikan pasukannya dimana pasukannya melakukan atau mencoba melakukan suatu kejahatan; dan gagal untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan kekuasaannya untuk mencegah terjadinya atau untuk melaporkannya kepada pihak-pihak yang berwenang untuk diadakan penyelidikan.
 - c. Seseorang akan bertanggung jawab secara pidana dan dapat dihukum

untuk suatu kejahatan jika dilakukan dengan niatan dan pengetahuan.

Dalam praktik hukum internasional, negara-negara juga mengenal adanya prinsip-prinsip umum. Yang dimaksud dengan prinsip-prinsip hukum ini adalah sekumpulan peraturan hukum-hukum dari pelbagai bangsa dan negara yang secara universal mengandung kesamaan. Artinya prinsip-prinsip tersebut juga ditemui dalam hukum nasional di negara-negara tersebut. Mahkamah Pidana Internasional yang pendiriannya berdasarkan Statuta Roma mengkodifikasikan prinsip-prinsip umum tersebut dalam norma dalam statuta yaitu :

1. *Nullum crimen sine lege*

Seseorang tidak dapat bertanggungjawab secara pidana kecuali jika tindakan tersebut pada waktu dilakukan merupakan suatu tindak pidana

2. *Nulla poena sine lege*

Seseorang yang telah didakwa hanya dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan Statuta ini.

3. *Non-retroactivity ratione personae*

Tidak ada seorangpun bisa bertanggung jawab secara pidana

untuk suatu tindakan sebelum berlakunya Statuta ini

4. *Individual criminal responsibility*
Seseorang yang melakukan suatu kejahatan di dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah akan secara bertanggung jawab secara pribadi dan dapat dihukum sesuai dengan Statuta ini.

5. *Exclusion of jurisdiction over persons under eighteen*

Mahkamah tidak mempunyai yurisdiksi untuk orang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun pada saat terjadinya suatu kejahatan

6. *Irrelevance of official capacity*

Statuta ini akan berlaku kepada setiap orang tanpa melihat perbedaan berdasarkan jabatannya dalam pemerintahan.

7. *Responsibility of commanders and other superiors*

Seorang komandan militer bertanggung jawab secara pidana untuk kejahatan yang dilakukan oleh pasukan dibawah komando dan kewenangannya, atau otoritas dan kewenangannya sebagai akibat dari kegalangannya dalam mengendalikan pasukannya, dimana pasukannya

- melakukan atau mencoba untuk melakukan suatu kejahatan; dan gagal untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan kekuasaannya untuk mencegah terjadinya atau untuk melaporkannya kepada pihak-pihak yang berwenang untuk diadakan penyelidikan
8. *Non-applicability of statute of limitations*
Kejahatan yang terjadi di dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah tidak tunduk pada batasan-batasan Statuta apapun.
9. *Mental element*
Seseorang akan bertanggung jawab secara pidana dan dapat dihukum untuk suatu kejahatan jika dilakukan dengan niatan dan pengetahuan.
10. *Grounds for excluding criminal responsibility*
Mengecualikan tanggung jawab pidana jika pada saat orang tersebut melakukan perbuatan dalam keadaan :
- Menderita penyakit kejiwaan atau kecacatan.
 - Dalam keadaan keracunan.
- c. Bertindak secara wajar untuk melindungi dirinya.
- d. Diakibatkan oleh tekanan karenaancaman kematian atau penganiayaan berat secara terus menerus.
11. *Mistake of fact or mistake of law*
Suatu kesalahan hukum dimana suatu jenis tindakan adalah suatu kejahatan di dalam wilayah yurisdiksi dari Mahkamah tidak akan menjadi dasar untuk mengecualikan tanggungjawab pidana.
12. *Superior orders and prescription of law*
Bahwa suatu kejahatan di dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah telah dilakukan oleh seseorang yang menerima perintah dari Pemerintah atau seorang atasan, baik militer maupun sipir, tidak membebaskan orang tersebut dari tanggung jawab pidana
- Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional ini merupakan langkah maju untuk meminta pertanggungjawaban para pelaku yang dianggap bertanggungjawab terhadap peristiwa pelanggaran serius terhadap

kemanusiaan sekaligus perlindungan terhadap kedaulatan negara, karena meskipun Mahkamah Pidana Internasional memiliki yurisdiksi terhadap 4 (empat) kejahatan sebagaimana disebut diatas keberadaan Mahkamah Pidana Internasional hanya memperkuat dan melengkapi pengadilan nasional, tidak menggantikan tugas dan fungsi penyidikan, penuntutan pengadilan nasional (prinsip komplementaris). Sebagaimana diatur dalam alinea 10 (sepuluh) Statuta : “*Emphasizing that international criminal court established under this statute shall be complementary to national criminal jurisdiction*”

Pasal 17 ayat 1 Statuta menunjukkan bahwa ada 4 (empat) situasi utama yang menentukan suatu kasus tidak dapat diterima oleh Mahkamah Pidana Internasional yaitu:(Danel Aditia Situngkir, 2013)

1. Kasus tersebut sedang diselidiki atau dituntut oleh suatu Negara yang memiliki yurisdiksi.
2. Negara yang menyelidiki dan menyimpulkan bahwa tidak ada dasar untuk mengadili.

3. Negara telah mencoba membawa orang tersebut kepada penuntutan di pengadilan namun terdapat kesalahan hukum.
4. Kasus tersebut memenuhi situasi tertentu.

Artinya pemberlakuan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional hanya dapat menggantikan yurisdiksi pengadilan nasional jika pengadilan nasional telah memenuhi kriteria prinsip *admissibility*. Prinsip *admissibility* ini harus memenuhi 2 (dua) kriteria yaitu:

1. Ketidaktinginan (*unwillingness*)
Ketidaktinginan suatu Negara mengadili suatu kejadian yang merupakan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional yang terjadi di wilayah teritorialnya berakibat Mahkamah Pidana Internasional akan campur tangan dalam kasus di mana Mahkamah Pidana Internasional ditemukan tindakan domestik digunakan secara nyata tidak untuk menegakkan keadilan.
2. Ketidakmampuan (*inability*)
Statuta mengidentifikasi 3 (tiga) keadaan untuk menyatakan ketidakmampuan Negara tersebut, yaitu :

- a. Negara tidak dapat memperoleh terdakwa.
- b. Negara tidak dapat memperoleh bukti yang diperlukan dan kesaksian untuk menempatkan orang-orang yang diduga bertanggung jawab untuk diadili.
- c. Negara tidak mampu melaksanakan proses peradilan.

D. Simpulan

Dari paparan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa eksistensi individu sebagai subjek hukum internasional tidak bisa diragukan lagi ini dipengaruhi oleh perhatian masyarakat internasional terhadap masalah hak asasi manusia. Bahkan dalam beberapa perjanjian internasional individu sebagai nature person diberikan hak dan kewajiban khusus. Khusus dalam hukum pidana internasional perlindungan terhadap hak asasi manusia diberikan dengan pengaturan tentang kejahatan-kejahatan paling serius terhadap kemanusian dimana orang yang dianggap pelaku harus bertanggung jawab. Upaya menuntut pertanggungjawaban individu melalui mekanisme pengadilan internasional telah dilakukan dengan

pembentukan 4 (empat) pengadilan adhoc yaitu Nuremberg Tribunal, Tokyo Tribunal, ICTR dan ICTY. Dalam pembentukan pengadilan tersebut terdapat beberapa prinsip hukum yang dilanggar misalnya saja asas non retroaktif dan asas pacta sunt servanda. Maka dari itu kesan dari keempat pengadilan tersebut lebih kepada kepentingan politik dari pada penegakan keadilan. Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional adalah langkah maju, karena merupakan pengadilan pidana internasional pidana pertama yang sifatnya permanen. Sifat komplementaris mahkamah juga merupakan bentuk perlindungan terhadap kedaulatan negara yang tujuannya meminta pertanggungjawaban orang yang melakukan kejahanan paling serius harus dihukum secara adil.

Daftar Pustaka

Buku

- Chris Wigwe Esq, C. I. and M. E. (2015). *Criminal Responsibility Under International Law: When Can An Individual Be Held Criminally Responsible Under Inter,* (April).
- Danel Aditia Situngkir. (2013). *Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional*

- (*International Criminal Court*) *Terhadap Negara Bukan Peserta Statuta Roma*. Andalas.
- Eddy OS Hiariej. (2010). *Pengadilan atas Beberapa Kejahatan Serius Terhadap HAM*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Hamdan. (2012). *Alasan Penghapus Pidana*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Ian Browlie. (1979). *Principles of Public International Law*. London: Oxford University Press.
- Jawahir Thontowi, P. I. (2006). *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Parthiana, I. W. (2006). *Hukum Pidana Internasional* (I). Bandung: CV. Yrama Widya.
- Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Sefriani. (2009). *Hukum Internasional*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sujatmoko, A. (2005). *Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM: Indonesia, Timor Leste dan Lainnya*. Jakarta: Grasindo.
- Jurnal**
- International, O. (1949). International military tribunal for the far east. *International Organization*, 3(1), 184–186.
<https://doi.org/10.1017/S0020818300014399>
- Kusniati, & Retno. (2011). Sejarah Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(5), 81–92. Diambil dari
<http://online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/view/536>
- Shaw, M. N. (2003). *International Law*.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781139051903>
- Zappalà, S. (2001). Do Heads of State in Office Enjoy Immunity from Jurisdiction for International Crimes? The Ghaddafi Case Before the French Cour de Cassation. *Ejil*, 12(1995), 595.
<https://doi.org/10.1093/ejil/12.3.595>
- Peraturan Perundang – Undangan**
- ICTY. (2007). Judgement summary. *Trial*, (December), 1–4.
- International Committee of the Red Cross. (1949). *The Geneva*

Conventions of 12 august 1949.

United Nations General Assembly.

(1949). The Charter and Judgment of the Nürnberg Tribunal – History and Analysis: Memorandum submitted by the Secretary-General (Document A/CN.4/5), 1–100.

Versailles. (1919). *Treaty of Peace with Germany (Treaty of Versailles).*

Paris Peace Conference 1919 (Vol. 59). Diambil dari <https://www.loc.gov/law/help/us-treaties/bevans/m-ust000002-0043.pdf>